

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/B/2018/PT.TUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 K/TUN/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/TUN/2019

Buku:

Atmosudirdjo, Prajudi. 1966. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gralia Indonesia.

Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT Alumni.

Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Gede Nyoman I Remaja. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Hadjon, Philipus M, dkk. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

_____. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap Yahya, M. 2018. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, M. I. 2002. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- Kamarullah. 2008. *Keputusan Tata Usaha yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdataa*, Surabaya: Tanjungpura University Pres.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Admnistrasi Dalam Praktek Tindakan Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Lotulung, P.E. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negera I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 125.
- Pamuji Kadar, dkk, *Hukum Administrasi Indonesia*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2023
- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
- Rakhmat, Muhamad. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Logoz Publishing.
- Razy Fakhruddin. 2020. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Banyumas: CV. Pena Persada Reda.
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal. 27.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Triwulan T, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Winanmo Basuki, Nur. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.

Willy, D.S. Voll. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita).

Yuslim. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Arwanto, Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah", *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 3, 2016.

Kurniawati, I., & Liany, L. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 10, 2019.

Hadjon, Philipus M. "Fungsi normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih." *Pidato dalam Peresmian Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya 10. 1994.

_____. "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997.

Ladju Kusmawardi, Suteki, dan Aprista Ristawati, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang". *Jurnal Law Reform* Vol. 14 No. 1. 2018.

Rumokoy, Nike K., "Peran P. TUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume. 20. Nomor 2, 2012.

Lotulung, Paulus Effendie. "Dalam Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia". *Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara(LPP-HAN)*, Jakarta. 2003.

V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* Vol. 1 No. 1,2020.

Media Online:

Hukumonline.com. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat. diakses pada 26 Januari 2024 [√ Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com),

KBBI. Arti kata Implikasi menurut KBBI. diakses pada 23 Februari 2024 [√ kbbi.web.id/implikasi](https://kbbi.web.id/implikasi).

Gurupendidikan. 2024. *Implikasi adalah*. diakses pada 23 Februari 2024 ✓
[Implikasi Adalah : Pengertian, Contoh, Jenis \(BAHAS LENGKAP\)
\(gurupendidikan.co.id\)](https://gurupendidikan.co.id),

